

PDS terjemahan ini didasarkan pada versi Inggrisnya yang bertanggal 28 Oktober 2016.



Indonesia: Akses Energi Berkelanjutan di Indonesia Timur-Program Pembangunan Jaringan Listrik

Nama Proyek	Akses Energi Berkelanjutan di Indonesia Timur-Program Pembangunan Jaringan Listrik	
Nomor Proyek	50016-001	
Negara	Indonesia	
Status Proyek	Diusulkan	
Jenis / Cara Bantuan Proyek	Pinjaman	
Sumber Pendanaan / Nilai	Pinjaman: Akses Energi Berkelanjutan di Indonesia Timur-Program Pembangunan Jaringan Listrik	
	Sumber daya modal biasa	US\$ 600,00 juta
Agenda Strategis	Pertumbuhan ekonomi yang inklusif	
Pendorong Perubahan	Peningkatan tata kelola dan kapasitas Solusi pengetahuan Pengembangan sektor swasta	
Sektor / Subsektor	Energi - Transmisi dan distribusi listrik	
Kesetaraan dan Pengarusutamaan Gender	Tidak ada elemen gender	
Uraian	Usulan program pinjaman berbasis hasil (<i>result-based loan</i> , RBL) senilai \$600 juta ditujukan untuk mendukung pembangunan jaringan distribusi listrik agar terhubung ke berbagai usaha dan rumah tangga, serta meningkatkan kualitas hidup di Indonesia bagian timur melalui penggunaan listrik yang memperhatikan kelestarian sebagai pendorong penting peningkatan kegiatan ekonomi. Program ini akan melengkapi usulan pinjaman sektor bagi pembangkit listrik tenaga gas alam berukuran kecil hingga sedang, guna menyediakan layanan energi secara berkelanjutan kepada masyarakat di seluruh Indonesia bagian timur. Gas alam adalah	

bahan bakar yang jauh lebih bersih dibandingkan dengan diesel. Selain itu, sifat mesin dan turbin berbahan bakar gas lebih cocok dipadukan dengan sumber energi terbarukan yang bekerja selang-seling seperti tenaga surya dan angin. Gas alam adalah bahan bakar transisi yang cocok untuk peralihan ke sistem energi rendah karbon. Kedua pinjaman tersebut akan membantu meningkatkan akses ke layanan energi berkelanjutan dan berkontribusi terhadap mitigasi perubahan iklim.

Kebutuhan investasi keseluruhan pemerintah bagi program pembangkit, transmisi, dan distribusi listrik adalah sebesar \$83,5 miliar, dengan \$43,5 miliar di antaranya berasal dari sektor swasta (produsen listrik independen) dan sisanya \$40 miliar ditanggung PLN. Kebutuhan investasi tersebut tidak akan dapat terpenuhi jika hanya ditanggung oleh Pemerintah dan PLN. PLN diperkirakan masih mengalami kekurangan pendanaan sebesar \$30,3 miliar yang harus ditutup dari sumber pembiayaan lain, termasuk dari mitra pembangunan. Di Indonesia Timur masih banyak jaringan yang terisolasi dan PLN sudah menggunakan sumber dayanya sendiri untuk mendirikan sistem transmisi tulang punggung 70 kilovolt (kV) dan 150 kV, sambil mencari dukungan dari ADB dan mitra lainnya untuk memperkuat dan memperluas jaringan distribusi.

Cara peminjaman berbasis hasil (RBL) akan digunakan untuk proyek yang diusulkan ini. Proyek ini akan membiayai sebagian dari kebutuhan total program yang lebih luas, seperti yang diidentifikasi PLN dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2015-2024 untuk pembangunan jaringan di Indonesia Timur. 8. Cara peminjaman berbasis hasil ini akan memperkuat dan membangun jaringan distribusi kelistrikan, yang melibatkan banyak kegiatan dan pengeluaran skala kecil. Hal ini akan membiayai sebagian dari kebutuhan total program yang lebih luas, seperti yang diidentifikasi PLN dalam RUPTL 2015-2024 untuk pembangunan jaringan di Indonesia Timur. RBL adalah cara yang cocok bagi program ini karena: (i) memungkinkan PLN untuk menggunakan sistem programnya sendiri, sehingga memberikan peluang untuk penguatan kelembagaan; (ii) memfokuskan perhatian pada hasil, bukannya pengeluaran dan mengarah pada budaya evaluasi yang lebih kuat dan sejalan dengan niat pemerintah untuk beralih ke peraturan berbasis kinerja; (iii) selaras dengan program PLN yang lebih luas di Indonesia dan karena itu, inovasi dari program RBL dapat ditingkatkan skalanya; (iv) biaya transaksinya yang berkaitan dengan pelaksanaan program lebih rendah; dan (v) dapat menstimulasi pembiayaan bersama (*cofinancing*) dan harmonisasi donor dengan mitra pembangunan lainnya melalui fokus pada hasil bersama. Operasi ini adalah bagian dari pendekatan program secara keseluruhan dan masuk dalam kerangka reformasi kebijakan yang didukung oleh pinjaman berbasis kebijakan dari Program Energi Berkelanjutan dan Inklusif, serta melengkapi RBL berjalan untuk memperkuat jaringan di Sumatera. RBL ini tercakup dalam Rencana Bisnis Operasi Negara (*Country Operations Business Plan*) 2015-2017 dan merupakan bagian penting dari sasaran Strategi Kemitraan (*Country Partnership Strategy*) untuk mengatasi kesenjangan energi antara Indonesia bagian Barat dan Timur.

Dasar Pemikiran Proyek dan Kaitan dengan Strategi Negara/Regional

Perekonomian Indonesia sedang berada di persimpangan penting. Pertumbuhan ekonomi telah menurun dari puncaknya 6,4% pada 2010 menjadi 4,8% pada 2015, terutama karena jatuhnya harga komoditas. Indonesia Timur memiliki potensi luar biasa untuk mendorong sumber pertumbuhan inklusif yang baru di sektor-sektor seperti perikanan, agro-industri, dan pariwisata, tetapi potensi ini terkendala oleh kurangnya infrastruktur penting, termasuk listrik, pelabuhan, jalan, dan komunikasi. Tidak meratanya pembangunan di berbagai provinsi juga berkontribusi terhadap melebarnya disparitas pendapatan daerah, dengan beberapa provinsi di Indonesia Timur yang tertinggal jauh dibandingkan Jawa dan Bali. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah memprioritaskan untuk meningkatkan dan mempercepat investasi infrastruktur di bawah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 saat ini, dengan menyebutkan kawasan terluar dan Indonesia Timur sebagai prioritas geografis.

Salah satu pilar dalam rencana investasi infrastruktur pemerintah adalah meningkatkan akses ke layanan listrik secara signifikan, termasuk target menambahkan 35 gigawatt kapasitas pembangkit listrik baru di seluruh Indonesia, dan memperluas jaringan listrik untuk meningkatkan rasio elektrifikasi hingga 97% pada akhir 2019 dari keadaan awal (*baseline*) 84% pada 2014. Tantangan terbesar untuk memenuhi target tersebut adalah di Indonesia bagian timur, yang jaringan listriknya di berbagai pulau dalam keadaan terisolasi, bermutu rendah, dan kurang dikembangkan. Rasio elektrifikasi di sejumlah provinsi kawasan timur masih rendah: Sulawesi Barat 74%, Sulawesi Tenggara 67%, Nusa Tenggara Barat 68%, Nusa Tenggara Timur 59%, dan Papua 44%.

Dampak

Kualitas hidup masyarakat Indonesia ditingkatkan melalui penggunaan listrik yang memperhatikan kelestarian sebagai pendorong penting peningkatan kegiatan ekonomi

Hasil

Akses yang diperluas ke layanan listrik yang lebih andal bagi pelanggan rumah tangga, komersial, dan industri di berbagai provinsi di Indonesia Timur, seperti di NTB, NTT, dan pulau Sulawesi

Keluaran

Sistem distribusi diperkuat dan diperluas
Inovasi dan kapasitas kelembagaan ditingkatkan

Lokasi Geografis

Kategori Perlindungan

Lingkungan

B

Pemindahan Bukan dengan Sukarela

B

Masyarakat Adat

B

Ringkasan Aspek Lingkungan dan Sosial

Aspek Lingkungan	Hasil program dengan potensi dampak lingkungan adalah perluasan dan penguatan jaringan distribusi voltase adalah rendah. Program ini dikategorikan B bagi lingkungan karena potensi dampak buruk bagi lingkungan di lokasi tertentu (terbatas pada lokasi yang akan mengalami pekerjaan fisik), terutama selama periode konstruksi, hanya sedikit (jika ada) dan tidak dapat dipulihkan kembali, serta dalam banyak kasus, langkah mitigasi dapat segera dirancang.
Pemindahan Bukan dengan Sukarela	Perluasan jaringan distribusi biasanya mencakup (i) pemasangan tiang beton di atas tanah yang luasnya tak lebih dari 0,2 m2 dan (ii) pemasangan konduktor yang kemungkinan memerlukan penebangan/pemangkasan pohon. Dampak dari pemindahan bukan dengan sukarela akan diidentifikasi selama pelaksanaan program.
Masyarakat Adat	Pulau Sulawesi dan Nusa Tenggara didiami oleh sejumlah kelompok etnis dengan bahasa yang berbeda-beda, tetapi mereka hanya merupakan bagian kecil dari jumlah penduduk keseluruhan dan kegiatan program diperkirakan tidak akan berdampak besar terhadap masyarakat adat. Meskipun daerahnya secara umum sudah diketahui, subproyek pada lokasi program untuk perluasan jaringan distribusi belum dipilih dan akan ditentukan selama pelaksanaan program. Program tidak akan secara spesifik menargetkan kegiatan di daerah (lahan atau wilayah) yang dikuasai, dimiliki, atau digunakan oleh masyarakat adat dan/atau diklaim sebagai tanah leluhur.

Komunikasi, Partisipasi, dan Konsultasi dengan Pemangku Kepentingan

Selama Rancangan Proyek	Pemangku kepentingan akan diajak berkonsultasi melalui rapat, wawancara, dan survei guna meningkatkan kesadaran mengenai program dan meminta masukan mengenai program tersebut. Konsultasi dengan kelompok miskin, rentan, dan marjinal akan berfokus pada berbagai masalah lingkungan, pemindahan tidak dengan sukarela (jika ada), dan persoalan sosial lainnya yang mungkin berdampak terhadap mereka.
Selama Pelaksanaan Proyek	

Staf yang Bertanggung Jawab

Pejabat ADB yang Bertanggung Jawab	Toru Kubo
Departemen ADB yang Bertanggung Jawab	Departemen Asia Tenggara (<i>Southeast Asia Department - SERD</i>)
Divisi ADB yang Bertanggung Jawab	Divisi Energi (<i>Energy Division</i>), SERD
Lembaga Pelaksana	P.T. Perusahaan Listrik Negara Kepala Dinas Rencana Pendanaan Gd.Timah Lt. III, Jl. Gatot Subroto Kav. 18 Jakarta Selatan, Indonesia

Jadwal

Persetujuan Konsep	21 Jun 2016
Pencarian Fakta	25 Jul 2016 sampai 04 Agu 2016
Rapat Kajian Manajemen	20 Sep 2016
Persetujuan	-
Misi Kajian Terakhir	-
PDS Terakhir Diperbarui	26 Sep 2016

Lembar Data Proyek (Project Data Sheets/PDS) berisi informasi ringkas mengenai proyek atau program: Karena PDS merupakan pekerjaan yang sedang berjalan, beberapa informasi mungkin tidak disertakan dalam versi awal, tetapi akan ditambahkan setelah informasi tersedia. Informasi mengenai proyek yang diusulkan bersifat tentatif dan indikatif.

ADB memberikan informasi yang terkandung dalam lembar data proyek (PDS) ini semata-mata sebagai sumber daya bagi penggunaannya, tanpa jaminan apa pun. Meskipun ADB berupaya menyediakan konten bermutu tinggi, informasi ini diberikan "sebagaimana adanya" tanpa jaminan apa pun, baik tersurat maupun tersirat, termasuk tanpa batasan, jaminan mengenai kelayakan jual, kecocokan bagi tujuan tertentu, dan non-pelanggaran. ADB secara khusus tidak memberikan jaminan atau pernyataan mengenai keakuratan atau kelengkapan informasi yang bersangkutan.